

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat lahir seiring dengan lahirnya orde baru awal tahun 1970-an. Lahirnya orde ini dengan paradigma pembangunan ekonomi sebagai *mainstreamnya* serta memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, membawa dampak pada rencana jangka pendek, menengah dan panjang pembangunan nasional yang diimplementasikan pada repelita. LSM sebagai salah satu *partner* pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan nasional dalam segala bidang.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, definisi LSM sulit dirumuskan. Namun, secara sederhana bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tempo, 4 Mei 1991:19). Dari definisi ini keberadaan LSM memang sangat diperlukan oleh masyarakat bawah / *grass roots* sebagai salah satu agen perubahan yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah dan rakyat.

Pertumbuhan dan peran LSM di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokratisasi yang ditandai penguatan masyarakat sipil atau *civil society* dalam transformasi pembangunan. Selama lima tahun terakhir lebih dari 10.000 LSM yang bergerak di bidang budaya, sosial ekonomi, politik. Peran strategis LSM ini dalam dasawarsa terakhir

menghadapi hambatan ketika LSM ingin mengimplementasikan perannya dalam proses demokratisasi yang dapat memberikan kontribusi pada transformasi politik.

Fakih (1996) mengatakan bahwa kontribusi NGO memperkuat masyarakat sipil sangat terbatas. Dengan berfokus pada ideologi NGO, ia menunjukkan bahwa meskipun NGO biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah, paradigma pembangunan NGO secara ideologis tak jauh berbeda dengan paradigma pembangunan pemerintah, yaitu *developmentalisme*. Perbedaannya hanyalah pada pendekatan dan metode pembangunan. Pemerintah menggunakan pendekatan dari atas (*top down*) atau non partisipatif, sedangkan NGO menggunakan pendekatan dari bawah (*bottom up*) atau partisipatif. Karena alasan inilah maka NGO sesungguhnya adalah pendukung *developmentalisme* dan konsekuensinya mereka lebih merupakan bagian dari Negara ketimbang masyarakat sipil (Hiariej dkk, 2004:103).

Philip Eldridge membagi gerakan LSM menjadi 2 kategori yaitu LSM pembangunan dan LSM mobilisasi. LSM pembangunan memfokuskan pada program-program pembangunan masyarakat konvensional seperti irigasi, air minum, pertanian, peternakan, pusat kesehatan dan pembangunan ekonomi lainnya. LSM mobilisasi memusatkan pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin terkait isu ekologi, HAM, status kaum perempuan, hak-hak hukum dalam hubungan dengan kepemilikan tanah dan kompensasi bagi tanah yang disita, hak-hak sewa pedagang kecil dan *savengers* (orang-orang yang tidak punya rumah dan tempat tinggal) (Fakih, 2004:120).

Menurut asumsi teoritis diatas dapat dipetakan tipologi LSM di Indonesia digolongkan menjadi LSM pembangunan dan non pembangunan. LSM pembangunan terwakili oleh LSM periode 1970 sampai awal 1980-an dan era 1990-an yang mulai mengembangkan wacana kritis terhadap kerangka pembangunan yang ditawarkan orde baru. LSM tipe ini bisa dilihat pada LSM lingkungan dan HAM seperti keberadaan YLBHI, WALHI, dan ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat) yang mulai berani menyuarakan aspirasi akar rumput. (Fakih, 2004:122).

Dalam proses mewujudkan pembangunan nasional yang merata bagi masyarakat, pemerintah pusat ataupun lokal sering mengambil kebijakan yang cukup dilematis. Karena, terkadang kebijakan tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja, bahkan terkadang cenderung merugikan masyarakat kecil. Tapi ironisnya, kebijakan tersebut diambil dengan dalih demi kepentingan masyarakat kecil.

Melihat paparan di atas dapat dikatakan bahwa dalam perkembangannya sering terjadi benturan kepentingan / *konflik of interest* antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah tidak bisa menyerap 100% aspirasi masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Disinilah LSM menjembatani kepentingan masyarakat tersebut dengan melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran-saluran baik formal maupun non formal.

Konflik pemerintah dengan LSM sebagai wakil masyarakat bisa dilihat pada kasus “Waduk Kedungombo Jawa Tengah”. Konflik soal tanah antara berbagai pihak sering terjadi, terutama antara masyarakat dengan pemerintah dalam hubungannya dengan rencana penggunaan tanah masyarakat tersebut untuk pembangunan dan demi kepentingan umum atas Negara. Konflik tersebut wajar karena masyarakat berhak mempertahankan hak mereka.

Masyarakat merasa pemerintah memberikan ganti rugi yang sangat kurang / kecil baik dalam ganti rugi tanah / rumah, pekerjaan (sawah) dan ternak. Masyarakat menilai pemerintah melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat dengan dalih demi kepentingan umum baik secara fisik (*Intimidasi*) maupun non fisik (*membujuk, up service, janji-janji kosong*) kasus Waduk Kedungombo ini bukan hanya permasalahan lokal namun telah menjadi masalah nasional. Berbagai LSM terlibat didalamnya, melalui advokasi, LSM membantu masyarakat memperjuangkan hak mereka. Bahkan INGI (*Internasional Non Governmental Institute*) sebagai LSM dari dunia Internasional pun ikut memberi tanggapan terhadap kasus ini.

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) sebagai salah satu LSM memainkan peran sebagai *social engeneering* (fungsi rekayasa sosial) dan *agent of change* (agen perubahan). Sebagai *social engeneering* WALHI yang bergerak di bidang lingkungan / ekologi menyusun program atau rencana strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi sebagai *agent of change* peran WALHI memfokuskan upaya-upaya penyadaran untuk membentuk kesadaran

kritis masyarakat yang bertanggung jawab dalam menghadapi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada masyarakat bawah.

Seperti yang telah diuraikan di atas pembangunan nasional selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Salah satu dampak negatif pembangunan menjadi fokus WALHI yaitu isu-isu terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem dan ekologi secara umum.

Eksistensi / peran serta WALHI dalam memberikan pendampingan / advokasi terhadap masyarakat terkait lingkungan hidup bisa dilihat pada kasus PT. Newmont, SUTET dan Pencemaran PLTU di Cilacap.

Mengingat banyaknya kasus yang ditangani WALHI membuka perwakilan diberbagai daerah termasuk di Yogyakarta. WALHI DIY perannya bisa dikatakan cukup banyak terlebih pada tahun 2005 - 2008. Tahun ini Yogyakarta mengalami bencana yang cukup besar dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup memperhatikan.

Bencana alam gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala richter (SR) cukup mengagetkan banyak pihak. Gempa tersebut telah menghancurkan berbagai infrastruktur baik fasilitas publik dan pribadi. Tercatat kerusakan bangunan di Bantul mencapai 188.972 rumah, korban jiwa mencapai 4.268 jiwa dan luka-luka lebih dari 37.000 jiwa.

Sesuai uraian di atas dapat dikatakan bahwa kerusakan alam di DIY sangat hebat karena kerusakan yang terjadi di Bantul sudah begitu banyak.

Padahal kerusakan gempa terjadi juga di Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, dan Kulonprogo serta kota Yogyakarta.

Selain bencana gempa tahun 2006 di Yogyakarta juga terjadi bencana gunung Merapi. Walaupun korban nyawa tidak sebanyak waktu gempa, tapi cukup menimbulkan kerusakan.

Menghadapi bencana alam tersebut Pemerintah dianggap kurang optimal. Pemerintah cenderung kurang persiapan karena kurangnya pengawasan terhadap kebijakan yang diambil. Sebagai contoh, dana rekonstruksi untuk korban bencana gempa bumi di Bantul. Dana rekonstruksi bagi para korban bencana pada awalnya dianggap akan sedikit mengurangi masalah yang diakibatkan gempa. Namun, dalam perkembangannya pemberian dana konstruksi cenderung membuat masalah baru di masyarakat.

Prosedur yang berbelit-belit dan pemotongan dana rekonstruksi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi salah satu penyebab munculnya konflik baru. Dalam hal ini pemerintah dianggap kurang *responsive* menghadapi aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat semakin terdesak akan kebutuhan tempat tinggal pemerintah cenderung birokratis dalam menyalurkan dana rekonstruksi. Tujuan pemerintah yang berhati-hati dalam memberikan dana tersebut memang bisa dimaklumi, untuk menghindari salah sasaran. Namun, seharusnya pemerintah lebih fleksibel.

Melihat masalah tersebut WALHI DIY berusaha memberi advokasi / pendampingan terhadap masyarakat korban bencana alam gempa. Advokasi yang dilakukan WALHI DIY selain untuk memperjuangkan hak-hak para

korban juga berusaha memandirikan / memberdayakan para korban untuk bisa bangkit dan siaga dalam menghadapi bencana.

Banyak orang beranggapan bahwa advokasi adalah tindakan Pembelaan Hukum (Litigasi) di pengadilan. Pandangan semacam ini tidak selamanya salah. Namun, juga tidak sepenuhnya benar. Menurut Mansour Faqih, advokasi bisa dikatakan sebagai usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan menggerakkan perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa terjadi konflik pemerintahan dengan masyarakat terutama korban bencana alam di Yogyakarta. Para korban menganggap pemerintah kurang *responsive*, sehingga mau tidak mau WALHI DIY sebagai LSM yang berfokus di lingkungan hidup turut membantu menjembatani tuntutan masyarakat untuk didampingi dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimanakah advokasi yang dilakukan WALHI DIY terhadap korban bencana di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah solusi WALHI DIY dalam mengatasi hambatan terkait dengan advokasi bencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui advokasi yang dilakukan WALHI DIY terhadap korban bencana di Yogyakarta
2. Mengetahui solusi WALHI DIY dalam mengatasi hambatan terkait dengan advokasi bencana

D. Kerangka Konseptual

1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

a. Pengertian LSM

Studi tentang LSM merupakan suatu fenomena baru dalam ranah sistem politik Indonesia. Istilah LSM ini sendiri merupakan bentuk dari adaptasi bahasa Inggris *Non Governmental Organisations* (NGOs). Edward dan Humme mendefinisikan istilah NGOs sebagai kategori organisasi yang batasannya sangat luas terjadi dari lembaga yang beragam. Mereka mencoba mendefinisikan batasan NGOs dilihat dari bentuk, ukuran dan fungsinya yang dibedakan menjadi 3 tipe yakni:

NGOs internasional seperti *Save the Children Aid* (biasanya disebut sebagai “Northern NGOs” atau “NNGOs”); LSM “perantara” di selatan (NGOs, selatan) yakni mereka yang mendukung kerja kelompok akar rumput (*grassroots*) melalui pendanaan, nasihat teknis dan advokasi; gerakan akar rumput dari jenis yang beragam (organisasi akar rumput atau GROs, dan organisasi yang berbasis komunitas atau CBOs) yang dikendalikan oleh anggotanya sendiri; serta jaringan kerja maupun federasi yang terdiri atas beberapa atau seluruh tipe LSM di atas (Mansour fakih, 2004:2-3)

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa LSM memang sulit dirumuskan. Namun secara sederhana bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian

masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Cholisin, 2002:6).

b. Tipologi Lembaga Swadaya Masyarakat

David Koerten melakukan generalisasi LSM berdasar strategi program pembangunan, yang ada 3 tipe generasi LSM. Generasi pertama disebut kelompok generasi bantuan dan kesejahteraan seperti *Save the Children, CARE, Catholic Relief Service* dan *World Vision* yang memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat miskin seluruh dunia.

Generasi kedua disebut lokal skala kecil dan swadaya yang merupakan reaksi atas LSM generasi pertama. Seringkali kegiatan LSM tipe kedua ini paralel dengan pemerintah tetapi didasarkan pada landasan layanan pemerintah tidak sampai ke desa-desa. Generasi ketiga disebut pembangunan berkelanjutan yang mulai meninjau isu dasar berkaitan dengan konsep berkelanjutan, luasnya dampak dan pemulihan biaya yang berulang. (Fakih, 2004:119).

Koerten tidak memandang perlu pentingnya paradigma pembangunan alternatif. Perhatiannya tertuju pada fungsi manajemen dan metodologi dinamika aktifis LSM dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat bawah.

Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai peta paradigma lembaga swadaya masyarakat.

Tabel 1.1

Peta Paradigma Lembaga Swadaya Masyarakat

	Konformisme	Reformisme	Transformasi
Sebab masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Keadaan rakyat - Takdir Tuhan - Nasib buruk 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya pendidikan - Pendidikan yang berlebihan - Nilai-nilai tradisional Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Eksploitasi - Struktur yang timpang - Hegemoni kapitalis
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi Penderitaan - Mendoakan - Mengharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produksi - Membuat struktur - Mengubah nilai-nilai rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menentang Eksploitasi - Membangun Struktur prekonomian/politik baru - Kontra <i>diskursus</i>
Program	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan anak - Bantuan Kelaparan - Klinik - Rumah panti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis - Bisnis kecil - Pengembangan Masyarakat - Bantuan Hukum - Pelayanan <i>suplemerter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Ekonomi alternative - Serikat buruh - Koperasi penyadaran
Tipe Perubahan dan Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kritik struktural
Tipe Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Percaya pada pemerintah - Konsultatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipatif - Memikul tanggung jawab bersama 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator partisipatif - Disiplin yang kuat
Tipe pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi derma - Kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu rakyat untuk mendorong diri sendiri - Revolusi Hijau - Pembangunan komunitas - Pendidikan non formal - Pendidikan kejuruan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Land Reform</i> - Riset partisipatif - <i>Popular education</i>
Inspirasi	<ul style="list-style-type: none"> - Konfirmasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Emansipasi - Transformasi

(Mansour Fakih, 2004 : 122)

Dari pemetaan paradigma LSM tadi *Hope and Timmel* memetakan posisi politis aktifis LSM menjadi topologi tipe lipatan sebagai berikut

1). Perspektif *Konformisme*

Tipe pertama terdiri atas aktifis LSM yang melakukan pekerjaan mereka berdasarkan kepada paradigma bantuan karitatif, atau sering disebut “bekerja tanpa teori” atau mereka yang berorientasi pada proyek dan bekerja organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang ada. Pada dasarnya, motivasi utama bagi program dan aktifitas mereka adalah menolong rakyat dan didasarkan pada niat baik untuk membantu mereka yang membutuhkan.

2). Perspektif *Reformis*

Kategori kedua ini didasarkan pada *ideology* modernisasi dan *developmentalisme*, dimana sekitar 80% mayoritas aktifis LSM mengikuti paradigma reformis ini. Hal yang menjadi tema utama paradigma ini menekankan pada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Dengan menempatkan isu-isu korupsi di pemerintah sebagai sebab utama dari keterbelakangan masyarakat. Mereka lebih memperhatikan pada aspek pendekatan dan metodologi dalam gerakannya serta mendukung *developmentalisme*. Tujuan utama pandangan ini adalah merubah pendekatan atas ke bawah dan bersikap non partisipatif ke arah

pendekatan yang lebih menekankan pada partisipasi dan swadaya masyarakat.

3). Perspektif *Trasformative*

Tipe ini merupakan alternatif terhadap 2 pendekatan terdahulu. Salah satu perspektif ini adalah mempertanyakan paradigma *mainstream* dan *ideology* yang tersembunyi di dalamnya serta berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur dan supra struktur yang menindas rakyat dan kemungkinan membuka potensi kemanusiaanya. Paradigma ini memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol produksi informasi dan ideologi mereka sendiri. Pendekatan ini biasanya ditemukan pada kalangan LSM yang bekerja pada isu-isu lingkungan. Semangat kontra hegemoni kapitalis dengan jelas ditunjukkan oleh LSM ini melalui Koran dan majalahnya. Hal tersebut diterjemahkan lewat aksi dalam program kampanye dan advokasi mereka membela dan mendukung petani miskin, rakyat pribumi dan kelompok termarginalkan mereka (Fakih, 2004:131-135).

2. Advokasi

a. Definisi Advokasi

Advokasi itu dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan

pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat.

Definisi dan pendekatan terhadap advokasi ini sekaligus melibatkan penggunaan kekuasaan dan mengubah kekuasaan untuk mempromosikan visi baru tentang masyarakat dan dunia produktif. Daya kreatifitas dan kecerdasan penggerak (fasilitator) mutlak sangat dibutuhkan. Kegiatan advokasi haruslah merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, dirancang untuk mendesak terjadinya perubahan baik dalam isu, tata-laksana maupun budaya hukum yang berlaku. (Miller dan Covey, 2005 : 12)

b. Jenis Advokasi

Advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu 'advokasi kasus' (*case advocacy*) dan 'advokasi kelas' (*class advocacy*) (Sheafor, Horejsi dan Horejsi, 2000; DuBois dan Miley, 2005).

- 1). Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas

nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

- 2). Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

c. Strategi Advokasi

Strategi Advokasi memiliki tiga setting atau aras yaitu; Mikro, Mezzo, dan Makro. Juga empat aspek mengkajinya yaitu; tipe advokasi, sasaran / klien, peran pekerja sosial dan teknik utama seperti table 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Strategi Advokasi

ASPEK	SETTING		
	MIKRO	MEZZO	MAKRO
Tipe Advokasi	Advokasi Kasus	Advokasi Kelas	Advokasi Kelas
Sasaran/Klien	Individu dan Keluarga	Kelompok formal dan organisasi	Masyarakat lokal dan nasional
Peran Pekerja Sosial	Broker	Mediator	Aktivis Analisis Kebijakan
Teknik Utama	Manajemen kasus (case management)	Jejaring (networking)	Aksi Sosial Analisis Kebijakan

Sumber: dikembangkan dari DuBois dan Miley (2005:228; 235-242)

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam pemberdayaan biasanya dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancang-kembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial.

Terkait dengan advokasi WALHI DIY, aras yang digunakan adalah aras Makro. Pada aras makro peran pekerja sosial adalah sebagai aktivis dan analisis kebijakan. Sebagai aktivis pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negosiasi

agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*.

Sebagai analisis kebijakan, pekerja sosial cenderung melakukan identifikasi sosial. Pekerja sosial melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah, mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif dan integratif.

- 1). Pendekatan *Prospektif*. Analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Mengajukan opsi kebijakan baru terhadap pemerintah untuk merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat, karena belum ada kebijakan untuk itu.
- 2). Pendekatan *Retrospektif*. Analisis dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada. Artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan.
- 3). Pendekatan *Integratif*. Perpaduan dari kedua pendekatan di atas. Analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan.

(Suharto, PhD, 2006 : 3 – 4)

d. Prinsip Advokasi

Beberapa prinsip yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam merancang advokasi yang sukses adalah:

1). Realistis

Advokasi harus bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Jangan membuang energi dan waktu untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai.

2). Sistematis

Perlu perencanaan yang akurat. Kemas informasi semenarik mungkin, libatkan media dengan efektif, buat advokasi secara bertahap / berurutan.

3). Taktis

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau alians / sekutu dengan pihak lain. Sekutu didasarkan persamaan kepentingan dan kepercayaan.

4). Strategi

Advokasi melibatkan kekuasaan, ketahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Petakan kekuatan kita dengan kekuatan lawan.

5). Berani

Tidak perlu menakut-nakuti lawan dan jangan menjadi penakut. Jadikan isu dan strategi yang dipilih sebagai motor gerakan dan tetap berpijak pada agenda bersama.

(Suharto, PhD, 2006 : 6-7).

e. Kegiatan Advokasi

Kegiatan advokasi merupakan kegiatan atau usaha untuk merubah / memperbaiki kebijakan publik sesuai dengan keinginan yang mendesak diadakannya perubahan itu. Kegiatan ini memerlukan daya kreatifitas dan kecerdasan dari penggeraknya (fasilitator).

Kegiatan advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh beberapa proses antara lain adalah proses legislasi dan yudikisi, proses politik dan birokrasi serta proses sosialisasi dan mobilisasi. Proses legislatif dan yudikisi adalah kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan *academic draft* hingga praktek litigasi untuk melakukan *judicial review*, *class action*, *legal standing* untuk menuju ulang isi hukum sekaligus membentuk presiden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.

Proses politik dan birokrasi adalah upaya / kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi (*lobby*, *negosiasi*, *mediasi*, *tawar menawar* dan lain-lain). Proses sosialisasi dan mobilisasi adalah kegiatan untuk membentuk opini publik melalui berbagai cara (*sasaran pers*, *unjuk rasa*, *boikot* dan lain-lain).

f. Tujuan dan Proses Advokasi

Pada dasarnya tujuan advokasi adalah melakukan pembelaan serta pendampingan terhadap seseorang atau masyarakat untuk menjamin dan memperjuangkan hak-haknya secara demokratis dan adil. Sedangkan proses dari advokasi biasanya terdiri dari

pengumpulan data, mengumpul langkah-langkah teknis serta evaluasi dan monitoring. (www.mctv@telkom.net)

3. Pengetahuan Bencana

Bencana adalah suatu kejadian baik dari alam ataupun karena ulah manusia atau campuran keduanya, yang terjadi baik secara mendadak atau perlahan, yang menimbulkan gangguan dan kerugian di masyarakat yang sifatnya meluas, dimana dengan segala kekuatannya masyarakat tersebut tidak mampu mengatasinya. (Buku Panduan Advokasi Bencana, WALHI DIY)

Bencana terjadi ketika ada ancaman (bisa dari alam, ulah manusia, atau campuran keduanya) yang berpadu dengan kondisi rentan di masyarakat, dengan ancaman yang sama, dapat menimbulkan resiko yang berbeda tergantung tingkat kerentanannya. Semakin rentan kondisi masyarakat, semakin besar resiko yang bisa diterima. Kondisi dan resiko tersebut terdiri dari manusia, lingkungan, ekonomi, infra struktur dan sosial budaya. Apabila kondisi masyarakat kuat, masyarakat tersebut termasuk kategori memiliki kapasitas. (Ismanto,dkk, 2008 : 2)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini disebut deskriptif karena prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau

pun obyek peneliti (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 2001 : 63).

Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena menurut Jane Richie penelitian ini bermaksud mencari upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong, 2004 : 6).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dipakai untuk memperoleh data primer adalah pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui dokumentasi.

a. Observasi Partisipatif

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung menulis segala informasi dan data serta hal-hal yang sesuai dengan masalah penelitian.

Observasi dilakukan dengan cara partisipasi aktif, dimana penulis secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan subyek penelitian melalui kegiatan *internship*. Dalam hal ini perlu diikuti relasi, interaksi dan komunikasi yang intensif antara penulis dan responden untuk meminimalisir kekeliruan pandangan antara keduanya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004 : 186).

Peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara. Inti dari jenis wawancara ini adalah pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan dipertanyakan dan tidak perlu membuat sistematika urutan pengajuan pertanyaan. Petunjuk wawancara ini berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup, pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya (Moleong, 2004 : 187).

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait advokasi yang dilakukan WALHI, hambatan yang dihadapi dalam advokasi dan solusinya. Wawancara dilakukan di lembaga WALHI DIY dengan pihak ED (Eksekutif Daerah) Bapak Suparlan S.Sos.I dan PSD (Manager Kampanye) Mas Umbu Wulang.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting (Moleong, 2004 : 216). Dalam penelitian

peneliti menggunakan dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen eksternal berupa informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, berita yang disiarkan media massa (Moleong, 2004 : 219).

Disini peneliti menggunakan dokumen yang berasal dari dalam maupun dari luar WALHI DIY. Dokumen internal berupa laporan pertanggungjawaban kinerja dan laporan internal WALHI juga buletin-buletin yang dibuat WALHI seperti majalah Toe-Goe, Kobar (Koran Selemba) dan film-film dokumenter. Dokumen eksternal berupa informasi yang diperoleh dari majalah, Koran dan Internet juga referensi buku-buku terkait advokasi bencana.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan secara induktif, yaitu analisis yang berpangkal dari kerangka berfikir khusus ke umum atau dengan kata lain kesimpulan umum berpangkal tolak dari menganalisa masalah yang diangkat secara mendalam. Sanapiah Faisal dalam bukunya Format-Format Penelitian mengemukakan beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu:

a. Reduksi data

Data yang telah dikelompokkan secara rinci disusun dalam bentuk uraian atau laporan. Tulisan tersebut masih berupa data mentah yang belum disusun secara sistematis. Untuk itu perlu dipilih dan

dirangkum hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Kategorisasi dan Unitisasi

Data yang disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematis ke dalam unit-unit dengan karakter atau sifat masing-masing data dan menonjolkan pada hal-hal yang pokok dan penting. Dari unit-unit data tersebut dipilih kembali dari yang bersifat pokok dan penting. Dari unit-unit tersebut dipilih kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada, sehingga terlihat persamaan dan perbedaan responden, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian.

c. Display Data

Display data dilakukan untuk melihat gambaran menyeluruh tentang data yang diperoleh selama penelitian. Disini dipaparkan data yang telah direduksi yang disajikan dalam bentuk narasi.

d. Pengambilan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diambil kesimpulan umum secara obyektif. Kesimpulan tersebut diperiksa dengan cara melihat reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.